



**DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN JOMBANG**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



Dinas Peternakan Jombang



dinas\_peternakan\_jombang



Dinas Peternakan Kabupaten Jombang





## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai tujuan dan sasaran yang dibebankan kepada Dinas Peternakan dalam kurun waktu tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan pula pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang pada tahun 2025. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran serta hasil yang diperoleh pada tahun 2025 ini berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Capaian kinerja pada tahun 2025 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang di tahun-tahun mendatang.

Jombang, Pebruari 2026  
KEPALA DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN JOMBANG  
  
**Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670917 199403 1 009



## DAFTAR ISI

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                        | i         |
| DAFTAR ISI .....                                                                            | ii        |
| DAFTAR TABEL .....                                                                          | iii       |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                          | iv        |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                       | v         |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                                                             | <b>1</b>  |
| 1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....                                                       | 2         |
| 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                            | 2         |
| 1.3 Struktur Organisasi.....                                                                | 8         |
| 1.4 Sumberdaya Aparatur.....                                                                | 8         |
| 1.5 Aspek Strategis Organisasi.....                                                         | 9         |
| 1.6 Isu Strategis.....                                                                      | 10        |
| 1.7 Sarana Dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....                                        | 11        |
| 1.8 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....                                                   | 12        |
| 1.9 Keuangan.....                                                                           | 15        |
| <b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>                                                     | <b>18</b> |
| 2.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja .....                                         | 18        |
| 2.1.1 Tujuan dan Sasaran .....                                                              | 18        |
| 2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....                                                    | 22        |
| 2.2 Perjanjian Kinerja .....                                                                | 22        |
| 2.3 Rencana Anggaran.....                                                                   | 23        |
| <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                                                  | <b>25</b> |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....                                                       | 26        |
| 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....                       | 26        |
| 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2<br>(dua) Tahun terakhir..... | 29        |
| 3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target<br>Jangka Menengah..... | 30        |



|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan<br>realisasi kinerja level nasional/internasional..... | 33        |
| 3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja.....                                                                          | 34        |
| 3.2. Ralisasi Anggaran.....                                                                                         | 42        |
| 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.....                                                 | 42        |
| 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....                                                                          | 50        |
| 3.3. Upaya Perbaikan Kinerja.....                                                                                   | 51        |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b> .....                                                                                        | <b>53</b> |

--



## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                        |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1  | Daftar Pegawai Dinas Peternakan.....                                                   | 9  |
| Tabel 1.2. | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran<br>Pembangunan Daerah..... | 10 |
| Tabel 1.3  | Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan Tahun 2025..                          | 15 |
| Tabel 2.1  | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.....                                                | 22 |
| Tabel 2.2  | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....                                           | 23 |
| Tabel 2.3  | Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran.....                                  | 24 |
| Tabel 3.1  | Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025.....                                   | 26 |
| Tabel 3.2  | Realisasi Produk Hasil Ternak Tahun 2025.....                                          | 28 |
| Tabel 3.3  | Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan<br>Tahun 2025.....               | 25 |
| Tabel 3.4  | Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan<br>Jangka Menengah..... | 30 |
| Tabel 3.5  | Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Standart Nasional.....                           | 33 |
| Tabel 3.6  | Capaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2025.....                                   | 42 |
| Tabel 3.7  | Perbandingan efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Mencapai<br>Kinerja.....              | 50 |
| Tabel 3.8  | Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Anggaran.....                                         | 51 |



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang
2. Penjanjian Kinerja
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
5. Pengukuran Kinerja
6. Data Inventaris



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Peternakan Kabupaten Jombang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Peternakan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi, agar instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2025 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.



## 1.1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Jombang melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah, **Struktur Organisasi** Dinas Peternakan dengan mendasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Keberadaan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Bupati membawa Kabupaten Jombang melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

## 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan di Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### (1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

- Fungsi Sekretariat:
  - a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;



- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.



**Sub Bagian Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Peternakan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas Peternakan;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- k. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- m. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- n. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

## (2) Bidang Budidaya

Bidang Budidaya mempunyai **tugas** pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan.;

- **Fungsi** Bidang Budidaya:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas budidaya dan pengembangan ternak;
- b. Pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi ternak terutama dalam peningkatan mutu bibit;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu makanan ternak;
- d. Pelaksanaan pembiakan dalam rangka peningkatan pengelolaan budidaya ternak;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

## (3) Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai **tugas** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi urusan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

- **Fungsi** Bidang Kesehatan Hewan :

- a. Penyusunan dan koordinasi program kerja pelaksanaan tugas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan serta pemetaan epidemiologi penyakit hewan;



- d. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kesehatan hewan dan standart Pelayanan kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan hegien, sanitasi usaha peternakan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- h. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penggunaan obat hewan, vaksin dan sera;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Peternakan.

#### (4) Bidang Agribisnis

Bidang Agribisnis mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi urusan kelembagaan, SDM dan penyuluhan, urusan bina usaha dan rekomendasi perizinan peternakan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

- **Fungsi** Bidang Agribisnis:

- a. Penyusunan program kerja pelaksanaan tugas agribisnis;
- b. Pelaksanaan identifikasi dan potensi serta perencanaan pengembangan permodalan, kelembagaan usaha dan jasa serta sistem agribisnis;
- c. Pelaksanaan pembinaan manajemen agribisnis dan kerjasama dengan instansi dan lembaga perbankan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengolahan data usaha peternakan, promosi pengolahan dan pemasaran hasil usaha peternakan dan jasa agribisnis untuk pengembangan informasi pasar;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis untuk pemantapan pengelolaan data agribisnis dan untuk statistik usaha peternakan;



- f. Pelaksanaan koordinasi, analisa penyajian data statistik usaha peternakan serta rekomendasi perizinan bidang usaha dan jasa peternakan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan

**(5) UPTD Rumah potong Hewan (RPH)**

- Mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Jombang maka Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mempunyai **UPTD Rumah Potong Hewan, kelas B**. UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang pemotongan hewan.
- **Fungsi** UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemotongan hewan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan jagal hewan;
  - c. Pelayanan penyuluhan pemotongan hewan kepada masyarakat;
  - d. Pelaksanaan larangan pemotongan ternak betina produktif;
  - e. Pelaksanaan informasi teknis baku pemotongan hewan yang sehat;
  - f. Pemberian pelayanan jasa pemotongan hewan; dan
  - g. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD Rumah Potong Hewan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(6) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.



### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah, **Struktur Organisasi** Dinas Peternakan dengan berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, berkoordinasi dengan:
  - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
  - 2. Kelompok jabatan Fungsional.
- c. Bidang Budidaya, berkoordinasi dengan:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kesehatan Hewan, berkoordinasi dengan:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Agribisnis, berkoordinasi dengan:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran 1.

### 1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang per Desember 2025 memiliki sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pada UPTD sebanyak 95 orang yang terdiri dari 6 orang pejabat struktural, 4 orang pejabat fungsional tertentu, 5 orang pejabat fungsional hasil peyetaraan 29 pejabat fungsional umum, serta 51 orang tenaga PPPK Paruh Waktu. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1.1 Daftar Pegawai Dinas Peternakan

| No | Jabatan                                            | Jenis Kelamin |           | Golongan |     |    |   |   |    |   |   | Pendidikan |    |    |      |       |     |     |    |
|----|----------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----|----|---|---|----|---|---|------------|----|----|------|-------|-----|-----|----|
|    |                                                    | Laki-laki     | Perempuan | IV       | III | II | I | X | IX | V | I | S3         | S2 | S1 | D-IV | D-III | SMA | SMP | SD |
| 1  | Kepala Dinas                                       | 1             | 0         | 1        | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 1  | 0  | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 2  | Sekretaris                                         | 1             | 0         | 1        | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 1  | 0  | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 3  | Kepala Bidang                                      | 1             | 2         | 3        | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 1  | 2  | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 4  | Kepala UPTD                                        | 0             | 0         | 0        | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 0  | 0  | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 5  | Kepala Sub Bagian                                  | 0             | 1         | 1        | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 1  | 0  | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 6  | Fungsional Penyetaraan                             | 2             | 3         | 0        | 5   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 0  | 5  | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 7  | Fungsional Tertentu                                | 3             | 1         | 0        | 4   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 0  | 4  | 0    | 0     | 0   | 0   | 0  |
| 8  | Fungsional Umum                                    | 8             | 5         | 0        | 7   | 6  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 0  | 5  | 0    | 3     | 5   | 0   | 0  |
| 9  | PPPK Penuh Waktu                                   | 9             | 7         | 0        | 0   | 0  | 0 | 1 | 7  | 7 | 1 | 0          | 0  | 8  | 0    | 0     | 7   | 0   | 1  |
| 10 | PPPK Paruh Waktu                                   | 44            | 7         | 0        | 0   | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0          | 0  | 14 | 0    | 4     | 29  | 2   | 2  |
| 11 | Jumlah ASN (PNS+PPPK Penuh Waktu+PPPK Paruh Waktu) | 69            | 26        | 6        | 16  | 6  | 0 | 1 | 7  | 7 | 1 | 0          | 4  | 38 | 0    | 7     | 41  | 2   | 3  |

## 1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan dalam meningkatkan produksinya akan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang meliputi lingkungan strategis wilayah dan nasional; lingkungan global dan regional; dan lingkungan strategis politik dan ekonomi sebagai berikut :

1. Lingkungan Strategis Global dan Regional tidak akan terlepas dari aturan aturan perdagangan bebas, terkait dengan diberlakukannya Technical Barrier On Trade, Sanitary Phytosanitary dan liberalisasi dalam perdagangan dan jasa.
2. Lingkungan Strategis Wilayah meliputi :
  - a. Seiring jumlah penduduk yang terus meningkat tidak terlepas dari kebutuhan bahan pangan yang berkualitas.
  - b. Terjadinya proses transformasi struktural perekonomian yang berdampak pada menurunnya pangsa pasar dari sektor pertanian, sementara tenaga kerja masih bertumpu di sektor pertanian.



3. Lingkungan Strategis Politik dan Ekonomi, yang akan berhadapan dengan pergeseran fungsi dan peran pemerintah termasuk berlakunya Undang-undang dan peraturan tentang pemerintahan daerah dan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

## 1.6 ISU STRATEGIS

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Jombang tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian propinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Jombang.

Tabel 1.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok                                    | Masalah                                                                  | Akar Masalah                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pertumbuhan sub sektor peternakan kurang optimal | Belum Optimalnya produksi dan produktivitas peternakan                   | Kurangnya jumlah SDM dan kurang Optimalnya Kualitas SDM Peternakan dan Kesehatan Hewan                   |
|    |                                                  |                                                                          | Banyaknya kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis                                                      |
|    |                                                  |                                                                          | Rendahnya efisiensi reproduksi (calving interval, S/C, gangguan reproduksi pada ternak ruminansia besar) |
|    |                                                  |                                                                          | Kurang optimalnya Kualitas Bibit Ternak yang ada                                                         |
|    |                                                  |                                                                          | Belum tercukupinya pakan ternak yang berkualitas                                                         |
|    |                                                  |                                                                          | Belum Optimalnya Teknologi Peternakan                                                                    |
|    |                                                  | Belum Optimalnya Daya Saing Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak | Belum Optimalnya mutu produk peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat                       |



| No | Masalah Pokok | Masalah                                                | Akar Masalah                                                                                                                                                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                        | veteriner dan kesejahteraan hewan                                                                                                                                   |
|    |               |                                                        | Belum Optimalnya informasi Produk Unggulan Peternakan                                                                                                               |
|    |               |                                                        | Belum Optimalnya pengolahan dan pemasaran produk olahan peternakan terakses informasi dan teknologi                                                                 |
|    |               | Kurangnya Sarana dan Prasana Peternakan                | Rendahnya jumlah dan kualitas sarana , prasarana kesehatan hewan dan perbibitan unggas seperti: puskesmas, Rumah potong hewan (RPH), Pusat Pembibitan Unggas Lokal. |
|    |               |                                                        | Kurang optimalnya ketersediaan sarana inseminasi Buatan (IB)                                                                                                        |
|    |               | Kurang optimalnya penataan kelembagaan kelompok ternak | Banyaknya kelompok ternak baru yang terbentuk                                                                                                                       |
|    |               |                                                        | Belum adanya regulasi ditingkat kabupaten terkait kelompok ternak                                                                                                   |

**Isu Strategis** yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan peternakan 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pentingnya keamanan pangan;
2. Pentingnya peningkatan status kesehatan hewan milik masyarakat;
3. Kurangnya keamanan produk olahan hasil peternakan;
4. Dinamika kelompok kurang maksimal;
5. Swasembada hasil ternak tidak terwujud;
6. Populasi dan Produksi ternak makin menurun;

## 1.7 SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Peternakan Kabupten Jombang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, Sarana dan Prasarana gedung perkantoran dan gedung penunjang teknis yang ada di Dinas Peternakan:



1. Rumah Potong Hewan ada 4 ( Jombang, Ploso, Mojoagung dan Ngoro)
2. Puskesmas ada 4 ( Puskesmas Jombang, Ploso, Ngoro dan Mojoagung)
3. Klinik Hewan type C
4. Pusat Perbibitan Ayam Lokal (Chicken Development Centre)

Sarana mobilitas kendaraan maupun peralatan perkantoran tentu menjadi faktor yang sangat strategis dalam menunjang proses bekerja seluruh aparatur. Dalam kaitan ini maka sesuai Buku Inventaris barang milik daerah yang tercatat di Dinas Peternakan adalah sebagaimana tersebut pada daftar lampiran 2.

## **1.8 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim evaluator Reformasi Birokrasi Perangkat daerah Nomor 000.8.6/10069/415.10/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, Hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang adalah 77.60 dengan kategori BB predikat Sangat Baik, yaitu Implementasi AKIP sudah sangat baik pada sebagian besar bidang atau unit di Dinas Peternakan yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, agar :

### **CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH**

1. Mempercepat proses dan upaya perubahan secara berkelanjutan melalui pengelolaan Agen Perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
2. Melakukan perbaikan rencana aksi secara sungguh-sungguh melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang Dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini berikut indikator rencana aksi yang menggambarkan



hasil/perubahan konkret agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.

3. Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan secara berkala dengan menganalisis secara sungguh-sungguh kecukupan rencana aksi dalam mendukung pencapaian RB PD, yang nantinya rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya.
4. Lakukan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai khususnya Tim RB PD sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

#### **CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH**

1. Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025
2. Mengukuhkan tata kelola One-Data melalui penetapan data steward, aturan mutu data, serta prefill untuk layanan prioritas
3. Membangun pusat integrasi (API gateway/ESB) dan penyeragaman nomor tiket lintas kanal (web, WA, loket)
4. Mengoperasionalkan observability (pemantauan SLA/SLI: latensi, tingkat kesalahan, ketersediaan) disertai sistem peringatan insiden
5. Memformalkan manajemen perubahan (change management) agar perluasan fitur tidak menurunkan tingkat kepuasan
6. Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas serta melakukan perbaikan rencana kerja berdasarkan isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan melakukan evaluasi menggunakan lembar kerja evaluasi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021
7. Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten



5. Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel, serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi.
6. Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025
7. Laporan pengadaan bulanan wajib dilaporkan kepada BPKAD dengan batas waktu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Jika pelaporan melebihi tanggal 10 berikutnya, maka akan dianggap terlambat dan mengurangi nilai IPA SKPD. Yang harus diperhatikan bagi perangkat daerah adalah batas waktu ini merupakan batas waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan salah satu poin indikator MCP KPK dimana pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD dari perangkat daerah untuk diupload dalam aplikasi sijaga milik MCP KPK. Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik maupun fisik
8. Perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan SKP melalui penyusunan bukti kinerja yang lebih lengkap, serta memastikan penilaian SKP tahunan dilakukan tepat waktu agar proses pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.
9. Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi yang mempengaruhi predikat kinerja setiap pegawai, dan yang berpengaruh pada perolehan nilai dimensi kompetensi, dan peningkatan kompetensi/diklat bagi ASN, serta pembinaan kedisiplinan ASN ditingkatkan mengurangi ASN yang dikenakan sanksi hukuman disiplin untuk penilaian tahun berikutnya.
10. Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.



## 1.9 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan Tahun 2025

| NO        | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                       | JUMLAH PAGU ANGGARAN     |                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           |                                                                                                      | APBD Murni               | APBD Perubahan           |
| <b>I</b>  | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                             | <b>356.923.000</b>       | <b>323.906.000</b>       |
|           | Retribusi Daerah                                                                                     | 356.923.000              | 323.906.000              |
|           | Retribusi Jasa Usaha                                                                                 | 356.923.000              | 323.906.000              |
|           | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                                                  | 42.857.000               | 42.840.000               |
|           | Retribusi Penyewaan Tanah                                                                            | 42.857.000               | 42.840.000               |
|           | Retribusi Rumah Potong Hewan                                                                         | 252.200.000              | 219.200.000              |
|           | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                               | 252.200.000              | 219.200.000              |
|           | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                                                            | 61.866.000               | 61.866.000               |
|           | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak                                  | 61.866.000               | 61.866.000               |
| <b>II</b> | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                                              | <b>14.251.154.514,20</b> | <b>16.228.930.292,45</b> |
| <b>1</b>  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                  | <b>7.888.920.602</b>     | <b>7.974.886.327,64</b>  |
|           | <b>I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                   | <b>20.274.250</b>        | <b>17.722.250</b>        |
|           | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 10.125.200               | 8.887.200                |
|           | 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.149.050               | 8.835.050                |
|           | <b>II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                            | <b>6.755.955.156</b>     | <b>6.510.219.521,92</b>  |
|           | 3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.613.513.906            | 6.352.622.421,92         |
|           | 4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 131.710.000              | 149.061.000              |
|           | 5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 4.376.750                | 4.376.750                |
|           | 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                    | 6.354.500                | 4.159.350                |
|           | <b>III Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                        | <b>24.000.000</b>        | <b>00,00</b>             |
|           | 7 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 24.000.000               | 00,00                    |
|           | <b>IV Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                | <b>387.923.957</b>       | <b>355.356.563</b>       |
|           | 8 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 3.534.050                | 3.534.050                |



| NO | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                     | JUMLAH PAGU ANGGARAN |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                    | APBD Murni           | APBD Perubahan   |
|    | 9 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 50.609.443           | 38.697.998       |
|    | 10 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 236.850.000          | 198.075.000      |
|    | 11 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 14.830.464           | 17.949.515       |
|    | 12 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 27.100.000           | 42.100.000       |
|    | 13 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 55.000.000           | 55.000.000       |
|    | V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | 161.160.000          | 328.952.965      |
|    | 14 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                     | 161.160.000          | 161.160.000      |
|    | 15 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                                                                    | 0                    | 12.027.600       |
|    | 16 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 0                    | 155.765.365,72   |
|    | VI Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | 351.120.000          | 383.314.788      |
|    | 17 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 110.400.000          | 116.550.000      |
|    | 18 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 240.720.000          | 266.764.788      |
|    | VII Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 188.487.239          | 379.320.239      |
|    | 19 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.010.000           | 40.010.000       |
|    | 20 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 113.357.239          | 154.190.239      |
|    | 21 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 0                    | 150.000.000      |
|    | 22 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 35.120.000           | 35.120.000       |
| 2  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                               | 5.000.509.781        | 6.430.947.309,53 |
|    | VIII Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota  | 59.509.450           | 54.110.650       |



| NO | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                              | JUMLAH PAGU ANGGARAN |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                             | APBD Murni           | APBD Perubahan   |
|    | 23 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                                                  | 59.509.450           | 54.110.650       |
|    | IX Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | 4.491.000.331        | 6.376.836.659,53 |
|    | 24 Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                                                                                                     | 4.491.000.331        | 6.376.836.659,53 |
| 3  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                     | 403.599.432          | 836.935.150,28   |
|    | X Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota                                              | 119.750.228          | 590.271.689,28   |
|    | 25 Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 119.750.228          | 590.271.689,28   |
|    | XI Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                      | 45.589.300           | 47.941.300       |
|    | 26 Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                                 | 45.589.300           | 47.941.300       |
|    | XII Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                                                                                                | 238.259.904          | 198.722.161      |
|    | 27 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha                                                                                                                  | 238.259.904          | 198.722.161      |
| 4  | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                                                                                                           | 123.817.120          | 24.273.750       |
|    | XIII Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan                 | 123.817.120          | 24.273.750       |
|    | 28 Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 123.817.120          | 24.273.750       |
| 5  | Program Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                | 834.307.579          | 961.887.755      |
|    | XIV Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                        | 834.307.579          | 961.887.755      |
|    | 29 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                             | 834.307.579          | 961.887.755      |



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Perencanaan strategis atau disebut dengan Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2030. Penyusunan Renstra melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Melalui PK, terwujudlah komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

##### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Rumusan **Tujuan** di dalam Perencanaan Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2025-2030 mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2030 adalah: ***“Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan”*** Indikator Tujuan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan merupakan lanjutan dari PK-awal tidak mengalami perubahan. Untuk Sasaran pertama Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan merupakan lanjutan dari PK-awal sedangkan sasaran kedua Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah berubah menjadi Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dalam PK-Perubahan.

**Sasaran** di dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah: ***“Meningkatnya Produksi Peternakan dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”***. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. *Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu*
2. *Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah*

**Sedangkan Sasaran** di dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2025-2030 adalah: ***“Meningkatnya Produksi Peternakan dan Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif”***. **Sasaran pertama** merupakan lanjutan dari PK-awal sedangkan sasaran kedua mengalami perubahan dalam PK-Perubahan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. *Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu*
2. *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut.

## **Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan**

### **1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

1. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak



## **2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - a. Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
  - b. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

## **3. Program Perizinan Usaha Pertanian**

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
  - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.

## **4. Program Penyuluhan Pertanian**

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
  - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

## **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### 2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030 kedepan akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                         | INDIKATOR SASARAN                                      | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                    | Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging, Telur dan Susu | %      | 2,93   |
| 2  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.           | Skor   | 73,5   |

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra tahun 2025-2030. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2025 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan sub kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut.

## 2.2 PERJANJIAN KERJA

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 target indikator sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan yaitu :



Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS                                                                | INDIKATOR KINERJA                                      | TARGET      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan</b> | <b>Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan</b>          | <b>4,33</b> |
| 1. | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                                                  | Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu | 2,93        |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif                               | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.           | 73,5        |

| Program                                                            | Anggaran         | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 5                                                                  | 6                | 7          |
| 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | 7.974.886.327,64 | APDB       |
| 2. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | 6.430.947.309,53 | APDB       |
| 3. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 836.935.150,28   | APDB       |
| 4. Perizinan Usaha Peternakan                                      | 24.273.750,00    | APDB       |
| 5. Penyuluhan Pertanian                                            | 730.573.386,00   | APDB       |

Dari sasaran tersebut terdapat 5 (Lima) program yang mendukung keberhasilan capaian target indikator sasaran tersebut. Masing-masing sasaran memiliki indikator sasaran yang didukung oleh beberapa program. Sasaran dan program yang ditetapkan tersebut menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 antara Kepala Dinas Peternakan dengan Bupati Kabupaten Jombang.

## 2.3 RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Peternakan Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar



Rp. 14.251.154.514,20. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp. 16.228.930.292,45.

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2025 memiliki dua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif. Melalui dana APBD Perubahan Tahun 2025 dialokasikan untuk mencapai target sasaran tersebut.

Tabel 2.3. Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran

| No. | Sasaran Strategis                                                                       | Anggaran                 | %          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|     | <b>Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan</b> | <b>16.228.930.292,45</b> | <b>100</b> |
| 1.  | Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan                                                  | 8.022.729.595,81         | 100        |
| 2.  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif                               | 7.974.886.327,64         | 100        |



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas mengelola urusan bidang Peternakan di Kabupaten Jombang. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

LKjIP Dinas Peternakan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/ tahun tertentu. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dinas Peternakan Kabupaten Jombang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Predikat Kinerja

| No | Interval nilai realisasi kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91 \leq 100$                    | Sangat Tinggi                        |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja sasaran atau juga dengan membandingkan antara realisasi Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran strategis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025**

| Tujuan/Sasaran                                                                   | No. | Indikator                              | Target | Realisasi   | Capaian (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan | 1.  | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan | 4,33   | Belum rilis | -           |



|                                                           |    |                                                        |      |      |        |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|------|------|--------|
| Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                    | 1. | Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu | 2,93 | 2,96 | 101,02 |
| Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif | 2. | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah            | 73,5 | 77,6 | 105,58 |

Dari sasaran strategis Dinas Peternakan, kinerja yang dicapai menunjukkan telah memenuhi kriteria tinggi dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 103,3%. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Peternakan Tahun 2025 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis di bawah.

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Peternakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan**

Indikator sasaran strategis 1 (satu) adalah

#### **"Prosentase Pertumbuhan Produksi Daging Telur dan Susu"**

Pertumbuhan produksi daging, telur, dan susu tahun 2025 didorong oleh **peningkatan permintaan konsumen, dukungan regulasi pemerintah (seperti Permen No. 32/2025 tentang kesejahteraan hewan/bebas kandang), inovasi teknologi peternakan (inseminasi buatan, pakan berkualitas), dan peningkatan kesadaran gizi** yang membuat protein hewani semakin penting, meski diiringi tantangan manajemen penyakit dan kualitas pakan yang harus diatasi.

Pangan asal ternak sangat penting karena berkontribusi besar terhadap gizi, kesehatan, dan ketahanan pangan Masyarakat. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi protein

hewani. Kurangnya konsumsi protein hewani dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting pada anak, anemia, serta penurunan fungsi kognitif dan fisik. Kesadaran akan pentingnya konsumsi protein hewani juga dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap produk peternakan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor peternakan dan kesejahteraan peternak lokal. Kebutuhan pangan asal ternak ini belum semuanya terpenuhi dari produksi lokal sehingga masih mendatangkan daging dari luar wilayah Kabupaten Jombang.

Tabel 3.2. Realisasi Produksi Hasil Ternak Tahun 2025

| NO    | JENIS TERNAK | PRODUKSI (Ton) |            | PERTUMB. (%) |
|-------|--------------|----------------|------------|--------------|
|       |              | TAHUN 2024     | TAHUN 2025 |              |
| 1     | Daging       | 22.950         | 24.048     | 4,78         |
| 2     | Telur        | 15.897         | 16.159     | 1,64         |
| 3     | Susu         | 15.904         | 16.167     | 1,66         |
| TOTAL |              | 51.545         | 56.374     | 2,96         |

Sektor peternakan mempunyai peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan hewani asal ternak melalui ketersediaan daging (sapi, kambing, domba, ayam, itik dan entok), susu dan telur sebagai salah satu komoditas bahan pangan pokok. Ketersediaan Produksi daging merupakan ketersediaan dari produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan entok dalam bentuk meatyield. Pada tahun 2025, capaian produksi hasil ternak sebesar 56.374 ton atau naik 2,96 persen dari tahun 2024 yaitu sebesar 51.545 ton.

### Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Indikator sasaran strategis 2 ( dua) adalah

#### “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”

Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang adalah 77.60 dengan kategori BB predikat **Sangat Baik** dengan nilai capaian sebesar 105,58% dari target yang ditetapkan sebesar 73,5 dengan hal ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi masi diperlukan perbaikan dalam hal desain secara tepat dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal yaitu:

- a. Ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan;
  - b. Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kegiatan utama; dan
  - c. Dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan
- Tingkat penerapan manajemen kinerja pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang masih belum memuaskan dengan katagori (BB). Karena itu masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi pada periode berikutnya.

### 3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua ) tahun terakhir

Tabel 3.3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan (dua) tahun terakhir

| Tujuan/Sasaran                                                                   | No. | Indikator                                              | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan | 1.  | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan                 | 6,02                 | 4,23                 | Belum rilis          |
| Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                                           | 1.  | Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu | 3,30                 | 2,83                 | 2,96                 |
| Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif                        | 2.  | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah            | 77,08                | 73,1                 | 77,6                 |

Analisis Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.

Bila dilihat sasaran indikator kinerja OPD Dinas Peternakan terhadap pertumbuhan produksi yang ditargetkan tahun 2025 adalah sebesar 2,93 persen, berdasarkan realisasi sebagaimana tabel diatas dapat dicapai 2,96 persen atau terealisasi sebesar 101,02% .



Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produksi daging, telur dan susu di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 yang menyebabkan prosentase pertumbuhannya tercapai 101,02% dari target diantaranya :

**Dukungan Program Makan Bergizi :** Implementasi program pangan nasional (seperti Makan Bergizi Gratis/MBG) menciptakan kepastian pasar bagi peternak, sehingga mendorong peningkatan produksi telur dan ayam ras pada tahun 2025.

**Kebijakan Hilirisasi dan Modernisasi :** Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendorong proyek hilirisasi untuk memperkuat ekosistem peternakan dari hulu ke hilir, termasuk penggunaan teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan transfer embrio untuk memperbaiki kualitas genetik ternak.

**Ketersediaan Pakan dan DOC :** Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pakan (jagung) dan ketersediaan bibit ayam (*Day Old Chick* /DOC) menjadi faktor krusial untuk menjaga kelangsungan produksi peternak mandiri

### 3.1.3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

| Tujuan/Sasaran                                                                   | No. | Indikator                                              | Target Akhir RPD 2024-2026 | Realisasi PK 2025 | Tingkat Kemajuan (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan | 1.  | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan                 | 4,33                       | Belum rilis       |                      |
| Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                                           | 1.  | Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu | 3,74                       | 2,96              | 79,14                |
| Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                  |     | Nilai Evaluasi SAKIP                                   | 80,5                       | 78,95             | 98,07                |
| Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif                        | 2.  | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah            | N/A                        | 77,6              | 0                    |

Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu di Kabupaten Jombang tahun 2025 terealisasi sebesar 2,96% dengan tingkat capaian

kemajuan sebesar 79,14 % dari target akhir renstra hal ini menunjukkan bahwa kinerja dinas peternakan untuk peningkatan produksi daging telur dan susu sudah memenuhi target dan diharapkan berhasil mencapai target diakhir RPJMD. Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas, diketahui bahwa capaian indikator kinerja mengalami keberhasilan.

Hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran meningkatnya Produksi Hasil Peternakan antara lain :

- 1) Pertumbuhan populasi ternak yang terus mengalami peningkatan seiring dengan penerapan berbagai program/kegiatan strategis dan tepat sasaran berbasis peternakan rakyat sehingga Produksi komoditas utama peternakan yakni daging, telur dan susu terus mengalami peningkatan, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.
- 2) Keberhasilan Program Penjaminan Kesehatan Hewan dalam menekan angka kejadian penyakit hewan strategis dan angka kematian ternak meskipun pada tahun 2024 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD pada tahun 2025 namun upaya penanganan, pengendalian dan pencegahan agar penyebaran PMK dan LSD tidak meluas telah dilakukan secara maksimal dengan pengobatan pemberian vitamin dan vaksinasi pada ternak.
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan sertifikasi unit usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan, baik pangan maupun non pangan.
- 4) Pembinaan kelembagaan peternak
- 5) Pembinaan, fasilitasi pakan ternak dalam rangka mendorong peningkatan populasi dan produktivitas komoditas utama peternakan di Kabupaten Jombang.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian diperlukan langkah – langkah strategis kedepan sebagai berikut :

- 1) Memberikan penyuluhan good farming practice secara berkala kepada para peternak,
- 2) Mengembangkan lahan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan alat mesin pengolah pakan skala kecil
- 3) Memberantas wabah penyakit ternak, melalui program pemberian vaksin, ataupun dengan cara memusnahkan hewan yang telah terjangkit



wabah penyakit. Disamping itu perlu meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak/ produk ternak.

- 4) Penjaminan produk asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal yang sesuai dengan standar Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Faktor Penghambat yang ditemui dalam mencapai produksi pangan asal ternak adalah sebagai berikut :

- Sebagian besar pakan ternak masih diimpor atau diproduksi di luar daerah, sehingga harga menjadi mahal
- Kurangnya lahan untuk subsektor peternakan
- Peternak yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang manajemen peternakan modern karena Peternak masih menggunakan metode tradisional dan kurang memahami teknik modern untuk meningkatkan hasil produksi
- Masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia terkait produksi aneka ternak lainnya
- Kurangnya Akses informasi pasar untuk pemasaran produk lebih luas

Faktor Pendorong yang mendukung dalam mencapai target produksi daging, telur dan susu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Adanya pertumbuhan populasi dan ekonomi meningkatkan permintaan daging, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk industri makanan
- Pasar produk hewani setiap tahun meningkat dilihat dari peningkatan konsumsi akan produk peternakan setiap tahunnya
- Mengarahkan Kepala Bidang Agribisnis untuk menyiapkan data mengenai harga produsen, harga di konsumen, data ketersediaan dan data kebutuhan ayam dan telur
- Konsolidasi dengan stakeholder

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Menyusun program kegiatan terkait pengembangan SDM
- Menyusun program kegiatan terkait penyuluhan akses informasi pasar

- Mempermudah akses perizinan dan membuka peluang ekspor dengan regulasi yang lebih mendukung
- Berkoordinasi terkait penyediaan lahan khusus untuk padang penggembalaan sebagai sumber pakan ternak
- Mengembangkan program pelatihan tentang teknologi modern dalam pemeliharaan ternak, manajemen pakan, dan kesehatan hewan.

### 3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

| Tujuan/Sasaran                                                                   | No. | Indikator                                              | Realisasi Jombang 2025 | Realisasi JawaTimur 2025 | Realisasi Nasional 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan | 1.  | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan                 | Belum rilis            | Belum rilis              | Belum rilis             |
| Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                                           | 1.  | Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu | 2,96                   | Belum rilis              | Belum rilis             |
| Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif                        | 2.  | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah            | 77,6                   | Belum rilis              | Belum rilis             |

#### Analisis Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Provinsi dan Nasional

- Pada umumnya ternak merupakan aset hidup (livestock) dalam tata kehidupan masyarakat peternak di Jombang. Ternak bukan merupakan komoditi bisnis, tapi lebih berfungsi kepada status sosial masyarakat, atau juga merupakan sumber tenaga kerja. Akibatnya, peternak akan menjual ternaknya jika mereka memerlukan uang tunai. Oleh karenanya, fluktuasi dan gejolak harga ternak biasanya terjadi bersamaan dengan terjadinya gejolak kebutuhan sosial atau keluarga, terutama pada kegiatan hari-hari besar keagamaan, sosial dan kebudayaan.
- Usaha peternakan sapi potong, sapi perah, domba dan kambing di Kabupaten Jombang sebagian besar dimiliki oleh peternakan rakyat, kecuali ayam ras.

Keseluruhan usaha tersebut selama ini kondisi peternakan rakyat masih tidak beranjak bahkan cenderung jalan ditempat. Sebagian besar usaha peternakan rakyat hampir tidak pernah menghitung seluruh biaya produksinya sehingga usaha peternakan rakyat akan kalah bersaing di pasar. Atau sebaliknya; akibat dari strategi pengembangan industri peternakan yang memanfaatkan peternakan rakyat sebagai bagian dari penyebaran resiko, dalam suatu sistem usaha. Atau para industri peternakan memanfaatkan skala kecil sebagai pendukung industri besarnya, mereka tidak mungkin akan menjadi industri dan harus tetap merupakan bagian dari sistem industri. Sehingga, peternakan rakyat malah menjadi sulit untuk mengembangkan usahanya.

- Peternakan rakyat yang masih sulit bersaing oleh kehadiran korporasi, maka beberapa upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan daya saing peternakan rakyat adalah sebagai berikut : (a) diperlukan intervensi dengan konsep pengembangan industri peternakan berbasis bahan baku produksi dalam negeri. Hal ini menjadi faktor yang akan mampu menekan biaya produksi dan produktivitas. (b) perlu inovasi teknologi adaptif pada berbagai struktur usaha ternak, sehingga teknologi yang diadopsi sama halnya dengan teknologi di daerah lainnya yang produk peternakannya . Hal ini penting dalam upaya perlindungan teknologi bagi peternakan rakyat skala kecil. (d) perlu intervensi permodalan melalui pendekatan kelompok usaha (kluster). Pendekatan individu usaha tidak akan lebih baik dan efisien bila dibandingkan dengan pendekatan kelompok. (e) perlindungan pasar dalam daerah terhadap serangan produk peternakan dari luar daerah melalui berbagai kebijakan fiskal maupun produk akhir teknologi.

#### **3.1.4 Analisis atas Realisasi Kinerja**

##### **a. Sasaran Program 1**

##### **Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak**

Capaian indikator Persentase Peningkatan Populasi Ternak sebesar 2,59%. Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2025 sebesar 6,98% maka diperoleh capaian Persentase Peningkatan Populasi Ternak sebesar 37% dengan kategori **sangat rendah**.



Secara umum populasi mengalami peningkatan tetapi masih belum memenuhi target yang ditetapkan hal ini disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi:

- Kondisi iklim yang tidak mendukung dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ternak
- Penanganan kesehatan kurang teratur dan program vaksinasi tidak menyeluruh, meningkatkan risiko penyakit
- Peternak masih bergantung pada sistem tradisional yang ekstensif, minimal ilmu tentang *pakan* , *pembibitan* , dan manajemen
- Kurangnya akses pakan berkualitas dan teknologi pengolahan pakan, bergantung pada pakan alami yang nutrisinya rendah.

b. Sasaran Program 2

**Meningkatnya Persentase Pengendalian kesehatan hewan dari Penyakit Hewan Menular Strategis**

Indikator Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dari Penyakit Hewan Menular Strategis.

Angka Pengendalian kesehatan hewan dari Penyakit Hewan Menular Strategis dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS khususnya lebih difokuskan pada penyakit HLT, Brucellosis, SAL, LSD, serta PMK. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dari Penyakit Hewan Menular Strategis, ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat zoonosis atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2025 Data laporan kasus Penyakit Hewan Menular pada tahun 2025 di wilayah Kabupaten Jombang dari sejumlah 24 jenis penyakit menular prioritas, ada **5 jenis penyakit** hewan menular yang terjadi di wilayah kabupaten Jombang dengan jumlah total **1.309 kasus**



dengan rincian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 1.137 kasus, Penyakit Brucellosis sejumlah 3 kasus, Penyakit Cacingan sejumlah 118 kasus, Penyakit LSD (Lumpy Skin Disease) sejumlah 46 kasus dan Penyakit Avian Influenza (AI) sejumlah 5 kasus.

Kasus penyakit Avian Influenza (AI) pada unggas tahun 2025 di wilayah Kabupaten Jombang terdapat laporan sejumlah 5 kasus yang ditemukan di Pasar Tambar (Pasar unggas hidup) yang bersamaan dengan surveilans aktif oleh Balai Besar Veteriner Wates. Sedangkan kasus AI di farm/peternakan unggas selama tahun 2025 tidak ada laporan. Hal ini sebagaimana hasil surveilans aktif berbasis risiko oleh Balai Besar Veteriner Wates (BBV Wates) di Kabupaten Jombang pada sejumlah 1.120 ekor unggas dari 112 unit epidemiologi di Kabupaten Jombang tanggal 3 - 7 November 2025 dengan hasil keseluruhan sampel menunjukkan hasil 100% negatif terhadap *High Pathogenic Avian Influenza* (HPAI). Hal ini disebabkan kesadaran peternak unggas akan pentingnya vaksinasi dan biosekuriti. Vaksinasi teratur sesuai jadwal dan strategi biosekuriti yang ketat membawa dampak baik yaitu peningkatan kekebalan ternak dan menurunnya ancaman serangan virus di lapangan. Terhadap temuan 5 ekor kasus positif HPAI di Pasar Tambar telah dilakukan langkah sterilisasi lokasi yaitu dengan melakukan penyemprotan desinfektan dengan tujuan utama mengeliminasi sumber agen penyakit dan memutus rantai penularan penyakit.

Helminthiasis (HLT) atau penyakit cacingan secara umumnya pada tahun 2025 dilaporkan sejumlah 111 kasus, jumlah ini mengalami penurunan daripada sebelumnya yang dilaporkan sejumlah 173 kasus. Diagnosa cacingan (HLT) didasarkan dari hasil pemeriksaan klinis di lapangan kemudian dilakukan pelaporan ke sistem ISIKHNAS namun tidak didasarkan peneguhan diagnosa secara uji laboratorium. Hasil diagnosa klinis cacingan kemudian ditindaklanjuti dengan pengobatan cacing dengan obat-obatan yang sesuai oleh petugas baik itu dokter hewan maupun paramedik dengan memerhatikan kondisi ternak (terutama pada ternak yang bunting maka disarankan untuk ditunda sampai melahirkan). Penyakit cacingan pada ternak yang terjadi pada Tahun 2025 disebabkan oleh parasit cacing yang menginfeksi saluran pencernaan dan hati,. Cacingan dapat



menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan meski jarang berakibat fatal pada ternak di awal periode serangan karena cacing menyerap nutrisi, mengurangi nafsu makan, menyebabkan kurus, bulu kusam, diare, anemia, dan pembengkakan. Pencegahan utama melalui tindakan menjaga kebersihan kandang, melayukan hijauan, memberi pakan berkualitas, serta pengobatan rutin dengan obat cacing ( dosis dan jenis disesuaikan).

Kejadian Penyakit Brucellosis (BR) pada tahun 2025 di Kabupaten Jombang ditemukan 3 kasus pada sapi perah di Desa Jarak dan Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam. Jumlah kasus tersebut menurun dibandingkan dengan kejadian pada tahun sebelumnya yaitu 9 kasus. Penelusuran kasus brucellosis dilakukan melalui surveilans aktif yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Peternakan Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner Wates. Brucellosis banyak yang tidak menunjukkan gejala klinis sehingga surveilans dilaksanakan secara acak terutama pada ternak yang terindikasi pernah bergejala keguguran. Pengujian brucella secara laboratorium dari sampel yang diuji melalui metode RBT, apabila menunjukkan hasil positif maka dilanjutkan dengan pengujian CFT. Hasil uji CFT ini yang menjadi acuan peneguhan diagnosa brucellosis. Sapi-sapi dengan hasil CFT positif maka disarankan untuk dilakukan pembedahan bersyarat untuk memutus reaktor brucellosis. Namun demikian kondisi di lapangan cukup sulit dilaksanakan karena secara klinis sapi tersebut tidak menunjukkan gejala sakit dan tidak adanya kompensasi/ganti rugi dari pemerintah menyebabkan peternak enggan melaksanakan. Solusi alternatif untuk mengurangi potensi penularan brucellosis yaitu dengan melakukan pemisahan sapi penderita brucellosis (sapi ditempatkan terpisah dari sapi yang lain) dan peningkatan sanitasi dan desinfeksi kandang serta melaksanakan program vaksinasi bila ada ketersediaan vaksin.

Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan salah satu penyakit menular pada hewan yang paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyebaran PMK pada hewan ternak berjalan dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian ekonomi yang besar karena menyebabkan penurunan produksi

daging dan susu, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produk hewani. Sebagaimana telah diketahui, Penyakit mulut dan kuku di wilayah Kabupaten Jombang telah mewabah pada tahun 2022 dan sampai saat ini masih menjadi ancaman serius bagi dunia peternakan sapi di Indonesia khususnya di Kabupaten Jombang. Kejadian PMK mulai 2022 sampai 2025 sangat fluktuatif. Pada kemunculan pertama di tahun 2025 kejadian PMK tercatat 7.877 ekor. Pada tahun 2023 menurun secara signifikan menjadi 476 ekor, jumlah tersebut menurun lagi pada tahun 2024 tercatat 350 kasus. Namun adanya peningkatan kasus PMK pada Tahun 2025 sejumlah 1.137 kasus. Gambaran umum kasus PMK yang terjadi pada 2023 s/d 2025 terjadi pada musim penghujan (periode bulan Desember s/d Maret).

Strategi pengendalian PMK berbasis vaksinasi pada ternak secara teratur setiap 6 bulan sekali pada ternak masih menjadi kunci utama dalam upaya mengendalikan penyakit. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini sedang menjadi trend wabah penyakit pada ternak berkuku genap di wilayah Indonesia. Penularan PMK terhadap hewan ternak lainnya berlangsung sangat cepat. Sehingga langkah komprehensif perlu dilakukan selain vaksinasi. Salah satunya adalah peternak perlu diarahkan untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan rutin melakukan desinfeksi dan pentingnya tindakan karantina/isolas jika ada ternak yang mengalami ciri-ciri terserang PMK. Data capaian hasil vaksinasi PMK tahun 2025 tercatat lebih dari 79.985 dosis (lebih dari 90% sasaran vaksinasi pada ternak sapi). Jumlah tersebut secara keseluruhan menurun dibanding tahun 2024 yang mencapai 151.437 dosis. Penurunan capaian vaksinasi ini tentu erat kaitannya dengan ketersediaan vaksin dari anggaran pemerintah yang semakin menurun.

Kasus Penyakit LSD (Penyakit Kulit Berbenjol) di Jombang pada tahun 2025 tercatat sejumlah 46 kasus. Kejadian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mana jumlah kasus LSD hanya dilaporkan 1 kasus. Kasus penyakit LSD disebabkan oleh virus dan penyebarannya dipicu oleh penularan melalui gigitan serangga. Beberapa Langkah/Upaya Pengendalian dan Penanggulangan LSD yang telah dilaksanakan yaitu deteksi dini, peningkatan kebersihan kandang dan menekan populasi vektor



(serangga) di sekitar kandang serta tentunya upaya vaksinasi dan peningkatan pengawasan lalulintas ternak antar kabupaten/antar provinsi menjadi kunci utama dalam menekan kasus penyakit LSD.

Sedangkan kejadian Salmonellosis (SAL) pada tahun 2025 tidak ditemukan laporan kasus. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik karena pada tahun 2024 masih ada laporan Salmonellosis sejumlah 1 kasus. Walaupun Salmonellosis tercatat nihil namun upaya-upaya seperti peningkatan higiene sanitasi dan desinfeksi pada unit produksi (di peternakan, rumah pemotongan hewan dan di unit penjualan produk hewan) perlu terus dilaksanakan dengan baik.

Indikator Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang Beredar di Masyarakat. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Untuk mencegah dan mengurangi risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, maka pengawasan keamanan menjadi sangat penting agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan pangan berupa keamanan, mutu, dan gizi. Keamanan pangan segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan pangan segar asal hewan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah persentase pangan segar mulai dari unit produksi hingga peredaran yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan. Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat



membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

### **Meningkatnya Persentase pengendalian produk hewan yang memenuhi standar keamanan pangan asal hewan**

Indikator Persentase Pengendalian Produk Hewan Yang Memenuhi Standar Keamanan Pangan Asal Hewan

Capaian Indikator Kinerja Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang Beredar di Masyarakat tahun 2025 sebesar 85,6%. Angka ini didapat dari perhitungan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sebanyak 64 sampel dibandingkan dengan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan secara keseluruhan sebanyak 85 sampel dikalikan 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target adalah :

- Sebagian peternak masih enggan melakukan vaksinasi PHMS;
- Ketersediaan program pemerintah dalam bentuk vaksin PHMS yang belum mencukupi kebutuhan di tingkat lapangan dan
- Lalulintas hewan antar wilayah belum dapat dikendalikan dengan optimal.
- Unit pemotongan hewan (unggas) banyak yang belum memenuhi standar.
- Penerapan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan yang masih belum merata
- Pengetahuan masyarakat terkait pentingnya produk hewan yang ASUH masih belum merata.

Faktor Penghambat yang ditemui dalam mencapai target adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan SDM teknis di bidang kesmavet
- Ketersediaan SDM teknis yang rendah dibanding dengan luas jangkauan pelayanan



- Banyak pelaku usaha pemotongan masih enggan memotong ternak di RPHR

Faktor Pendorong yang mendukung dalam mencapai target

- Adanya kepastian regulasi terkait lalu lintas hewan dan produk hewan
- Pelayanan aktif Puskesmas
- Ketersediaan sistem e-pelaporan keswan yang terhubung secara nasional
- banyak unit usaha pemotongan unggas masih belum terstandar
- Tersedianya RPH-R yang sudah standar (NKV dan Halal)

c. Sasaran Program 3

**Meningkatnya Persentase rekomendasi izin usaha Peternakan**

Indikator Capaian Persentase Rekomendasi Izin Usaha merupakan perbandingan realisasi rekomendasi izin usaha terhadap target tahun 2025. Capaian Indikator prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha adalah sebesar 12%, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 6%, maka realisasi Indikator mencapai 200% atau masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target adalah :

- Terbitnya PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka pemohon harus mengakses OSS-RBA. Pemohon telah mengakses permohonan melalui OSS-RBA, namun dalam aplikasi OPD dan DPMPTSP permohonan tersebut tidak muncul sehingga belum dapat terselesaikan tepat waktu (maintenance aplikasi)
- Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain:
- OPD berkoordinasi dengan DPMPTSP, selanjutnya DPMPTSP berkoordinasi ke pusat

d. Sasaran Program 5



### Meningkatnya Persentase poknak yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas

Indikator Capaian Persentase Poknak Yang Mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Capaian Indikator Persentase Poknak Yang Mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kapasitas adalah sebesar 6,61%, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 4,5%, maka realisasi Indikator mencapai 119,72% atau masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target adalah :

- even promosi produk unggulan daerah mengikuti agenda pemerintah daerah

Faktor Pendorong yang mendukung dalam mencapai target:

- Kontes ternak bekerjasama dengan Indonesia Goat Breeders (IGB) yang telah terbiasa menyelenggarakan kontes ternak sehingga kontes terselenggara dengan sukses dengan diikuti peserta dari seluruh Indonesia

Pelatihan pengolahan hasil ternak bekerjasama dengan BBPP sebagai narasumber sehingga materi sangat bermutu

## 3.2 Realisasi Anggaran

### 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan Realisasi Anggaran

Tabel 3.6. Capaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2025

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                          | INDIKATOR                                                                                        | ANGGARAN         |               |             | KINERJA   |           |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|    |                                                                           |                                                                                                  | TARGET           | REALISASI     | CAPAIAN (%) | TARGET    | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur                                                    | 1.622.263.905.72 | 1.566.772.569 | 96,58       | 100%      | 99.94 %   | 100         |
|    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan | 17.722.250       | 17.583.500    | 99.22       | 100%      | 100%      | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | 8.887.200        | 8.760.600     | 98.58       | 4 dokumen | 5 dokumen | 125         |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                                                              | ANGGARAN    |             |             | KINERJA    |            |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI  | CAPAIAN (%) |
|    | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.835.050   | 8.822.900   | 99,86       | 8 Laporan  | 8 Laporan  | 100         |
|    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan                                                                                                                | 126.913.350 | 126.688.225 | 99,82       | 100%       | 100%       | 100         |
|    | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 149.061.000 | 149.061.000 | 100         | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100         |
|    | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 4.376.750   | 4.174.500   | 95,38       | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100         |
|    | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                       | 4.159.350   | 4.158.000   | 99,97       | 17 Laporan | 17 Laporan | 100         |
|    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                | 355.356.563 | 340.245.959 | 95,75       | 100%       | 100%       | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3.534.050   | 3.492.800   | 98,83       | 1 Paket    | 1 Paket    | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 38.697.998  | 38.082.300  | 98,41       | 6 Paket    | 6 Paket    | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 198.075.000 | 188.766.000 | 95,30       | 2 Paket    | 2 Paket    | 100         |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR                                                                              | ANGGARAN       |             |             | KINERJA    |            |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|    |                                                                                              |                                                                                        | TARGET         | REALISASI   | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI  | CAPAIAN (%) |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 17.949.515     | 17.798.720  | 99,16       | 2 Paket    | 2 Paket    | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan           | 42.100.000     | 37.300.000  | 88,60       | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 55.000.000     | 54.806.139  | 99,87       | 60 Laporan | 60 Laporan | 100         |
|    | Kegiatan <b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur                           | 328.952.965,72 | 320.498.297 | 97,43       | 100%       | 100%       | 100         |
|    | Sub Kegiatan <b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 161.160.000    | 159.651.300 | 99,06       | 1 unit     | 1 unit     | 100         |
|    | Sub Kegiatan <b>Pengadaan Mebel</b>                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 12.027.600     | 10.581.997  | 87,98       | 7 unit     | 7 unit     | 100         |
|    | Sub Kegiatan <b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Lainnya</b> | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 155.765.365,72 | 150.265.000 | 96,47       | 12 unit    | 12 unit    | 100         |
|    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah                                | 383.314.788    | 359.864.663 | 93,88       | 100%       | 100%       | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 116.550.000    | 111.343.087 | 95,53       | 12 Laporan | 12 Laporan | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 266.764.788    | 248.521.576 | 93,16       | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 100         |
|    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                      | 379.320.239    | 371.186.650 | 97,86       | 100%       | 100%       | 100         |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya                                             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau                                                 | 40.010.000     | 33.589.404  | 83,95       | 1 unit     | 1 unit     | 100         |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                              | ANGGARAN                |                      |              | KINERJA         |                 |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
|    |                                                                                                                                        |                                                                                                        | TARGET                  | REALISASI            | CAPAIAN (%)  | TARGET          | REALISASI       | CAPAIAN (%)  |
|    | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                         | Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                        |                         |                      |              |                 |                 |              |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 154.190.239             | 154.108.486          | 99,95        | 33 unit         | 33 unit         | 100          |
|    | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya                                                             | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Peternakan yang dipelihara                             | 150.000.000             | 148.413.000          | 98,94        | 1 unit          | 1 unit          | 100          |
|    | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                                        | 35.120.000              | 35.075.760           | 97,3         | 40 unit         | 40 unit         | 100          |
| 2. | <b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>                                                                            | <b>Prosentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan memadai</b>                                | <b>6.430.947.309,53</b> | <b>6.316.497.000</b> | <b>98.22</b> | <b>76.19 %</b>  | <b>71.43 %</b>  | <b>93,75</b> |
|    | Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            | Prosentase Pakan yang Beredar di Masyarakat yang sesuai standart                                       | 54.110.650              | 52.048.000           | 96.19        | 85,7%           | 84,69%          | 98,82        |
|    | Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar                     | 54.110.650              | 52.048.000           | 96.19        | 4 Laporan       | 4 Laporan       | 100          |
|    | Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Populasi Ternak                                                                                 | 6.376.836.659,53        | 6.264.449.000        | 98.24        | 20.254.469 ekor | 19.182.989 ekor | 94,71        |
|    | Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                                                                   | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar                                                                 | 6.376.836.659,53        | 6.264.449.000        | 98.24        | 4 laporan       | 4 Laporan       | 109,38       |



| NO       | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                           | ANGGARAN              |                    |              | KINERJA      |               |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                              |                                                                                                                                     | TARGET                | REALISASI          | CAPAIAN (%)  | TARGET       | REALISASI     | CAPAIAN (%)  |
| <b>4</b> | <b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>                                               | <b>Prosentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis</b>                                                     | <b>836.935.150,28</b> | <b>824.449.960</b> | <b>94,64</b> | <b>82,7%</b> | <b>85,95%</b> | <b>103,9</b> |
|          | Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase desa yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan                                                                          | 590.271.689,28        | 578.750.510        | 98.05        | 3,7 %        | 9,15%         | 247,3        |
|          | Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 590.271.689,28        | 578.750.510        | 98.05        | 21 Kecamatan | 21 Kecamatan  | 100          |
|          |                                                                                                                              | Prosentase Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat                                         |                       |                    |              | 76,7%        | 85,6%         | 111,60       |
|          | Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | Jumlah Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner                                                 | 47.941.300            | 47.787.150         | 99.68        | 3 Jenis      | 3 Jenis       | 100          |
|          | Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                     | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                  | 47.941.300            | 47.787.150         | 99.68        | 18 Laporan   | 34 Laporan    | 200          |
|          | Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                                                     | Jumlah Pengawasan Persyaratan teknis Kesehatan hewan                                                                                | 198.722.161           | 197.912.300        | 99.59        | 11680 ekor   | 5849 ekor     | 50           |
|          | Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha                                                         | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan                                                                | 198.722.161           | 197.912.300        | 99.59        | 4 ekor       | 4 ekor        | 100          |
| <b>5</b> | <b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>                                                                                     | <b>Prosentase Peningkatan Rekomendasi Izin Usaha</b>                                                                                | <b>24.273.750</b>     | <b>23.169.500</b>  | <b>95.45</b> | <b>6%</b>    | <b>12%</b>    | <b>200</b>   |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                          | ANGGARAN    |             |             | KINERJA    |            |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI  | CAPAIAN (%) |
|    | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan                   | Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang memenuhi syarat                                                                                                      | 24.273.750  | 23.169.500  | 95,45       | 18 Rekom   | 19 Rekom   | 105,56      |
|    | Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 24.273.750  | 23.169.500  | 95,45       | 15 Dokumen | 19 Dokumen | 126,67      |
| 6  | <b>Program Penyuluhan Pertanian</b>                                                                                                                                      | <b>Prosentase kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat</b>                                                                                                | 961.887.755 | 696.806.490 | 72,44       | 4,5%       | 6,61%      | 119,72      |
|    | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                | Prosentase poknknak yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas                                                                                               | 961.887.755 | 696.806.490 | 72,44       | 14,5%      | 17,36%     | 119,72      |
|    | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                             | Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                     | 961.887.755 | 696.806.490 | 72,44       | 42 unit    | 42 unit    | 100         |

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota memiliki outcome, Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur mencapai 100% yang berarti layanan kesekretariatan berjalan sesuai dengan prosedur dan keluhan pengguna layanan telah seluruhnya ditindaklanjuti, program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu dengan capaian 100% dari target 100% atau capaian 100%. Terdapat 4 dokumen yang disusun tepat waktu. Dokumen yang telah disusun tepat waktu



adalah RENJA 2025, RENJA Perubahan, DPA, RKA, dan 20 Laporan yang terdiri dari LKjIP, LKPJ, LPPD, Satu Data, Evaluasi Kinerja Tribulan, Data Statistik Peternakan Bulanan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran 2025 adalah 96,58.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Realisasi Tingkat Pengelolaan kepegawaian 39 stel dari target 40 Stel.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum 100% dari target 100% atau capaian 100%, sehingga administrasi umum berjalan dengan baik selama tahun 2025.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Realisasi Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah 100% dari target 100%. Dinas Peternakan memiliki jumlah BMD asset tetap dan BMD aset lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Realisasi Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% dari target 100%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Realisasi capaian Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik 100% dari target 100%

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
2. Kurangnya keterampilan dan pemahaman staf terhadap proses administrasi keuangan dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut;



3. Kurangnya pelatihan dan pemahaman staf tentang kebijakan administrasi umum dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan;
4. Kurangnya pemahaman dan pelatihan staf tentang regulasi pengadaan daerah dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan pengadaan;
5. Ketidakmampuan untuk menyediakan dukungan keuangan yang memadai dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan jasa penunjang urusan
6. Ketidakcukupan anggaran untuk pemeliharaan dapat membatasi kemampuan untuk menjaga dan memperbaiki barang milik daerah secara teratur.

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi informasi yang memadai telah memudahkan pengukuran dan pemantauan indikator kinerja, yang pada gilirannya mendorong peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
3. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepegawaian yang jelas dan terstandarisasi
4. Penerapan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan
5. Adanya kebijakan yang jelas dan mendukung dalam pengadaan barang milik daerah
6. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan
7. Pengelolaan inventaris BMD yang baik

Adapun upaya dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui Diklat
2. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

### 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi capaian kinerja per sasaran dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Mencapai Kinerja.

| Tujuan/ Sasaran                                                                  | No. | Indikator                                              | Capaian PK 2025 (%) | Anggaran 2025     | Realisasi Anggaran 2025 | Capaian Anggaran 2025 (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan | 1.  | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan                 | Belum rilis         | 15.997.615.923,45 | 13.306.008.643          | 83,17                     |
| Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                                           | 1.  | Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu | 101,02              | 8.022.729.595,81  | 7.140.497.960           | 89                        |
| Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif                        | 2.  | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah            | 105,58              | 7.974.886.327,64  | 6.165.510.683           | 77,31                     |

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan

dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi capaian kinerja per sasaran dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.8. Efisiensi Berdasarkan Sumberdaya Anggaran

| No. | Sasaran Strategis                                         | Indikator Kinerja                                      | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                    | Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu | 101,02            | 89                    | 1,14              |
| 2.  | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah            | 105,58            | 77,31                 | 1,37              |

Pada sasaran Meningkatkan Produksi Peternakan ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,14. Pada tahun selanjutnya perlu lebih diprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut.

Sedangkan untuk indikator sasaran kedua Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,37.

Nilai (+) tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien terhadap capaian kinerja.

### 3.3. Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan ke depan dalam rangka upaya pencapaian kinerja tahun berikutnya adalah .

1. Penerapan Good Breeding Practices (GBP) dan Good Farming Practices (GFP) pada peternak/ kelompok peternak diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak
2. Pembinaan kepada unit pemotongan hewan (unggas) terkait pentingnya pemenuhan persyaratan teknis kesmavet (Sertifikasi Halal dan NKV).



3. Melakukan pembinaan kepada unit usaha produk hewan secara berkesinambungan terkait pentingnya Penerapan higiene sanitasi dalam rangka menghasilkan produk hewan yang memenuhi standar.
4. Meningkatkan KIE kepada masyarakat terkait kesadaran dalam memilih produk hewan yang ASUH melalui berbagai media cetak dan elektronik
5. Meningkatkan KIE kepada peternak terkait pentingnya vaksinasi pada ternak sehat melalui berbagai media cetak dan elektronik.
6. Menambah stok vaksin dan obat-obatan dari APBN dan APBD Provinsi untuk memperluas jangkauan pelayanan di tingkat lapangan.
7. Upaya penerapan peningkatan biosecurity dan desinfeksi secara rutin di tempat pengumpulan ternak (pasar hewan dan RPH).
8. Refreshing tatacara pelaporan keswan di ISIKHNAS, monev pelaporan secara berkala dan distribusi obat-obatan untuk menambah amunisi pelayanan
9. Sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola unit usaha produk hewan terutama unit pemotongan unggas untuk menerapkan higiene-sanitasi secara baik dan benar
10. Sosialisasi dan pembinaan kepada para jagal untuk kembali aktif memotong ternak di RPHR tersertifikasi (NKV dan Halal)
11. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi sertifikasi dan ijin edar serta pelayanan informasi pasar.
12. Pelatihan diharapkan dapat diselenggarakan setiap tahun dengan jumlah peserta lebih banyak



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Peternakan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Peternakan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian kinerja sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dalam mendukung pembangunan sub sektor peternakan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan dan Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator berupa :

- 1) Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu tercapai 2,96% dari target sebesar 2,93%
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 77,6 dari target 73,5.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran kinerja, prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu tercapai 101,02% sedangkan prosentase nilai evaluasi SAKIP tercapai 101,02%. Sasaran meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dengan indikator Prosentase pertumbuhan produksi daging telur dan susu belum memenuhi target pada tahun 2025 dikarenakan meningkatnya populasi yang berbanding lurus dengan produksi terutama untuk ternak unggas dan mulai meningkatnya kembali daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan produksi peternakan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang DPA Perubahan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang



Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.997.615.923,45, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.306.008.643, atau dengan serapan dana APBD mencapai **83,17%**. Dengan demikian dapat dikatakan pada Tahun 2025 Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.691.607.280,00 atau 16,83%. Sisa anggaran ini karena efisiensi anggaran dari gaji dan tunjangan serta adanya anggaran yang direalisasikan ditahun 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang belum optimal karena tidak memperhitungkan ketersediaan anggaran dan jumlah sumberdaya manusia yang ada di Dinas Peternakan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, dan khususnya untuk tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Namun demikian, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain 1) Sebagian besar kepemilikan ternak untuk ruminasia potong, baik besar maupun kecil adalah peternakan rakyat yang bersifat subsiten dengan kepemilikan 2-3 ekor; 2) Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Penyakit Mulut dan Kuku, Septicaemia Epizootica, Avian Influenza, di beberapa Kabupaten Jombang yang berpengaruh terhadap produksi ternak; 3) Produktivitas ternak masih rendah karena manajemen reproduksi dan pemuliaan belum optimal; 4) Daya saing produk peternakan masih rendah; 5) Dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) semakin terbatas.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang telah melakukan upaya dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun intervensi melalui belanja pemerintah yang bersumber dari APBD dan non APBD. Dalam upaya untuk mendukung percepatan peningkatan populasi dan produksi ternak maka Dinas Peternakan pada tahun 2025 secara berkesinambungan akan terus melakukan berbagai program/kegiatan terobosan yang berkelanjutan, antara lain: 1. Mendukung program percepatan peningkatan produksi daging sapi dan susu, 2. Melakukan koordinasi



intensif dengan Kementerian/Lembaga, provinsi dan stakeholder terkait. 3. Melaksanakan kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan 4. Mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi untuk Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terutama percepatan vaksinasi PMK yang saat ini sedang merebak, baik kejadian maupun kasus di lapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini sebagai laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Jombang tahun 2025, semoga dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menentukan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan peternakan di Kabupaten Jombang.

Jombang, Pebruari 2026  
KEPALA DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN JOMBANG

**Drs. MOCHAMAD SHALEH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670917 199403 1 009



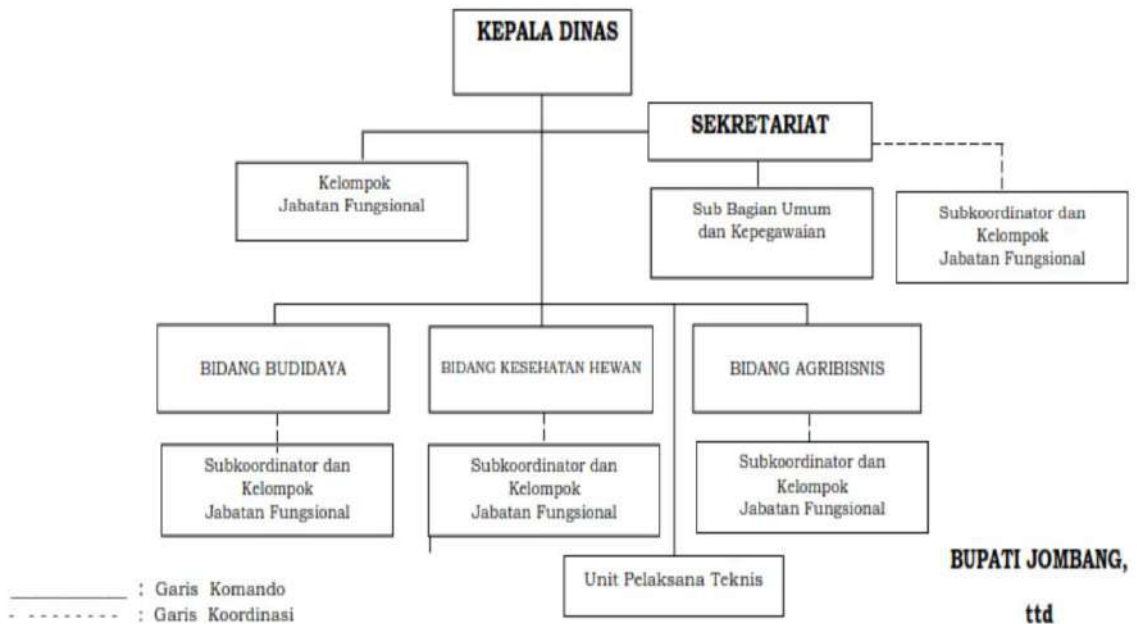
Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Jombang

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 91 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTERNAKAN KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 100.1.6.1/850/415.29/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si  
Jabatan : Bupati Jombang  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 26 September 2025  
Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Peternakan  
Kabupaten Jombang

Ditandatangani secara elektronik



Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si.  
NIP. 196709171994031009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG**

| NO | Tujuan / Sasaran                                                                 | Indikator Kinerja                                      | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                                                                                | 3                                                      | 4      |
| 1. | Meningkatnya PDRB sektor unggulan melalui peningkatan PDRB Sub Sektor Peternakan | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan                 | 4,33   |
|    | a. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan                                        | Persentase pertumbuhan produksi daging, telur dan susu | 2,83   |
|    | b. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif                     | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah            | 73,50  |

| Program                                                            | Anggaran         | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 5                                                                  | 6                | 7          |
| 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | 7.974.886.327,64 | APDB       |
| 2. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | 6.430.947.309,53 | APDB       |
| 3. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 836.935.150,28   | APDB       |
| 4. Perizinan Usaha Peternakan                                      | 24.273.750,00    | APDB       |
| 5. Penyuluhan Pertanian                                            | 730.573.386,00   | APDB       |

Pihak Kedua,  
Bupati Jombang  
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Jombang, 26 September 2025  
Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Peternakan  
Kabupaten Jombang  
Ditandatangani secara elektronik

Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si  
NIP 196709171994031009



### Lampiran 3. Rencana Aksi Tahun 2025

#### RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

1. NAMA : Drs. MOHAMAD SALEH, M.Si  
2. NIP. : 196709171994031009  
3. PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
4. JABATAN : Plt. Kepala Dinas Peternakan  
5. UNIT KERJA : Dinas Peternakan

| NO | KISERJA                                                            | INDUKTOR KINERJA<br>INDIVIDU                                                                           | TRISULAN 1                                                                                                                             |        | TRISULAN 2                                                                                                                             |        | TRISULAN 3                                                                                                                             |        | TRISULAN 4                                                                                                                             |        |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                    |                                                                                                        | RENCANA AKSI                                                                                                                           | TARGET | RENCANA AKSI                                                                                                                           | TARGET | RENCANA AKSI                                                                                                                           | TARGET | RENCANA AKSI                                                                                                                           | TARGET |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah            | IKU.1<br>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah                                                          | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi SAKIP Perangkat Daerah                                                                              | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi SAKIP Perangkat Daerah                                                                              | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi SAKIP Perangkat Daerah                                                                              | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi SAKIP Perangkat Daerah                                                                              | 25%    |
| 2  | Meningkatnya (Produksi) Peternakan                                 | IKU.2<br>Pencapaian pertumbuhan produksi daging, telur dan susu                                        | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu                                                         | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu                                                         | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu                                                         | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Pertumbuhan produksi daging, telur dan susu                                                         | 25%    |
| 3  | Terperolehnya Peningkatan Urutan Pemertintahan Daerah Kabupaten    | IKU.1.1<br>Pencapaian rata-rata capaian kinerja aparatur                                               | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rencana capaian Kinerja Aparatur                                                 | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rencana capaian Kinerja Aparatur                                                 | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rencana capaian Kinerja Aparatur                                                 | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Rencana capaian Kinerja Aparatur                                                 | 25%    |
| 4  | Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak                          | IKU.2.1<br>Pencapaian Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan minimal                            | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan minimal                            | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan minimal                            | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan minimal                            | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan minimal                            | 25%    |
| 5  | Terlaksananya Peningkatan Status Kesehatan Ternak dan Produk Hewan | IKU.2.2<br>Pencapaian Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis                      | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis                      | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis                      | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis                      | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Wilayah yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis                      | 25%    |
|    |                                                                    | IKU.2.3<br>Pencapaian Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat | 25%    |
| 6  | Terlaksananya Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha                   | IKU.2.4<br>Pencapaian Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha                                               | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha                                               | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha                                               | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha                                               | 25%    | 1. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan Peningkatan Rekomendasi Ijin Usaha                                               | 25%    |
| 7  | Terlaksananya Peningkatan Kelompok Ternak                          | IKU.2.5<br>Pencapaian kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat                                | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat                                | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat                                | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat                                | 25%    | 2. Mengkoordinasikan dan supervisi Proses Pelaksanaan kelompok ternak yang kapasitas usahanya meningkat                                | 25%    |

Ahmad Lanting  
Kepala Jombang

WAHIDUL HIL, M.Si  
NIP. -

Jombang, 20 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Peternakan

Drs. MOHAMAD SALEH, M.Si  
NIP. 196709171994031009